



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 November 2022

Nomor : 400.5/8476/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan yang Mendukung
Percepatan Penurunan Stunting di
Daerah Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah disusun hasil pemetaan program dan kegiatan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagaimana terlampir.

Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menyandingkan indikator pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang terdiri dari 8 indikator provinsi dan 64 indikator kabupaten/kota terbagi menjadi 29 indikator esensial dan 35 indikator *supply* dengan metadata kinerja, indikator dan satuan pada sub kegiatan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung percepatan penurunan *stunting* sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022-2024.

Dalam hal terdapat pemutakhiran tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akan dilakukan penyesuaian pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting* tersebut.



Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
22. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
23. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
24. Sekretaris Utama Sekretariat Negara;
25. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Lampiran : Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Nomor : 400.5/8476/SJ

Tanggal : 27 November 2022

1. Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 Tahun 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	KODE	Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan
1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	100% kab/kota	2022	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting	Perencanaan	5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan	100% prov dan kab/kota	2022	Pelaksanaan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Perencanaan	5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 Tahun 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	KODE	Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan
	penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)				Perencanaan	5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan
3	Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	100% prov	2023	Peningkatan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting pada pemerintah daerah provinsi	Keuangan	5 02 02 1.06 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
4	Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan	100% kab/kota	2023	Cakupan kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Keuangan	5 02 02 1.02 05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen
					Keuangan	5 02 02 1.06 01	Inventarisasi dan Analisis Data	Terlaksananya Inventarisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 Tahun 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	KODE	Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan
	Penurunan Stunting						Bidang Keuangan Daerah	Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
5	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah provinsi	2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah provinsi	Perencanaan	5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan
6	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting	100% kab/kota	2024	Cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan stunting	Perencanaan	5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah
7	Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	90% prov dan kab/kota	2024	Cakupan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Perencanaan	5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/ Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 Tahun 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	KODE	Nomenklatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan
8	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100% kab/kota	2024	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perencanaan	5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/ Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	Dokumen

2. Hasil Pemetaan Indikator Data Supply berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
1	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Min 1 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Program Penunjang	X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	Min. 2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kecamatan	Program Penunjang	X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
					Kecamatan	7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Laporan

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
							Instansi Vertikal Terkait	dan Instansi Vertikal Terkait	dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	2 kali	Tiap tahun	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Perencanaan	5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
4	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima luran (PBI) Kesehatan	112,9 Juta Jiwa	2024	Jumlah jiwa Penerima Bantuan luran (PBI) jaminan kesehatan Nasional	Kesehatan	1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
5	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	100% kab/ kota	2022	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki regulasi tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen
					Sekretariat Daerah	4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen
6	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	100% desa/ kelurahan	2022	Cakupan pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
7	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90% Kader	2024	Cakupan Kader pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
					Kecamatan	7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas
					Kecamatan	7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan
8	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan	100% desa/kelurahan	2022	Cakupan desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen
					Program Penunjang	X XX 01 2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
	(Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)			(Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Kecamatan	7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
9	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	90% desa/kelurahan	2024	Cakupan desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
10	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	80% desa/kelurahan	2024	Cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi bagi sasaran keluarga berisiko stunting	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
11	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	2 kali	Tiap tahun	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting oleh pemerintahan desa	Kecamatan	7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
12	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	100%	2024	Cakupan desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus baru stunting balita dalam 1 (satu) tahun pemantauan data hasil bulan timbang	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
13	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	90%	2024	Cakupan pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting melalui hasil penilaian laporan konvergensi desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
14	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	Kecamatan	7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
15	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100% desa/kelurahan	2024	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
16	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	90%	2024	Cakupan Desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF)	Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
17	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70%	2024	Cakupan sasaran yang telah memperoleh layanan Komunikasi Antar Personal (KAP) terhadap jumlah sasaran layanan dari KAP	Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
18	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	1 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan laporan publikasi data stunting hasil bulan timbang	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
19	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100% kab/ kota	2023	Cakupan kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	Kesehatan	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
					Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
20	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90%	2024	Cakupan penguatan kapasitas posyandu dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	Kesehatan	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen
21	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	50%	2024	Cakupan audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting	Kesehatan	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
22	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100% desa/kelurahan	2024	Cakupan bidan desa/kelurahan yang ada di setiap desa/kelurahan	Kesehatan	1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang
23	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75%	2024	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah cakupan pelaku usaha pangan fortifikasi yang menindaklanjuti rekomendasi dari Pemda terhadap keseluruhan pelaku usaha pangan fortifikasi yang menerima	KUKM	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha
					Kelautan dan Perikanan	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah Unit Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Unit Usaha

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
					rekomendasi dari Pemda	Perindustrian	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terseleenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
24	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga berisiko stunting	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan
25	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	2 kali	Tiap Tahun	Tersedia laporan hasil surveilans keluarga berisiko Stunting berbasis Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen
26	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90%	2024	Cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan
27	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90%	2024	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Laporan

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
				Hari Pertama Kehidupan (HPK)			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
					Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang
28	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	90% kab/ kota	2024	Cakupan data capaian Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000 di setiap kabupaten/kota	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Akses Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses Keluarga dan Remaja	Laporan
					Pengendalian Penduduk dan KB	2.14.04.2.01.01	Pementukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kelompok

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 1.01 04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
29	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	90% Desa/ Kel	2024	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Pendidikan	1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang
						1 01 02 2 03 27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang
30	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70% Desa/ Kel	2024	Cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Pendidikan	1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
31	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	3 kanal/ metode	Tiap Bulan	Pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator dengan 3 kanal/metode setiap bulan	Komunikasi dan Informasi	2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
32	Persentase kabupaten/kota yang	100% kab/ kota	2024	Kab/Kota yang Mengintervensi Keamanan	Pangan	2 09 05 2.01 03	Registrasi keamanan pangan segar asal	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting				Pangan adalah Kab/Kota yang memiliki program intervensi keamanan pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan kriteria minimal: 1) melaksanakan 1 program intervensi keamanan pangan untuk masyarakat; 2) melaksanakan 1 program intervensi keamanan pangan untuk pelaku usaha pangan siap saji dan pangan olahan; 3) melaksanakan 1 program intervensi keamanan pangan untuk pangan segar.			tumbuhan daerah kabupaten/kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	
					Pangan	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen
					Kesehatan	1 02 05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen
					Kesehatan	1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan pengawasan sertia tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan sertia tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan sertia tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Unit Kegiatan
					Kelautan dan Perikanan	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan persyaratan perizinan Berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Unit Usaha
					KUKM	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan	Unit Usaha

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Indikator	Target	Tahun	Definisi Operasional	Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
								pengembangan Usaha Mikro	dan pengembangan Usaha Mikro	pendampingan terhadap usaha mikro
					Pengendalian Penduduk dan KB	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen
33	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 Juta Jiwa	2024	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
34	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 Jiwa	2024	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
35	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	100% Pendamping	2024	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terlatih modul kesehatan dan gizi	Sosial	1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

3. Hasil Pemetaan Indikator Cakupan Essensial Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
1	Remaja	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58	Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah terhadap seluruh remaja putri	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
2		Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) terhadap seluruh remaja putri	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
3	Calon Pengantin / Pasangan Usia Subur (PUS)	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap seluruh calon PUS	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
4		Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90	Persentase Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah terhadap seluruh Calon Pasangan Usia Subur	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
5		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90	Persentase Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah terhadap seluruh calon PUS				Keuangan Keluarga)		
					Kesehatan	1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
					Kesehatan	1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
					Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
6		Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	90	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting terhadap seluruh calon pengantin	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
					Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang
7		Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
8		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90	Persentase PUS miskin dan penyandang masalah sosial yang menerima BPNT terhadap jumlah PUS miskin dan penyandang masalah sosial	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
9		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
10	Ibu Hamil	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90	Persentase Ibu Hamil KEK (yang memiliki lingkaran atas kurang dari 23,5 cm) yang mendapatkan tambahan asupan gizi terhadap seluruh Ibu Hamil KEK	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
					Kesehatan	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
11		Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80	Persentase Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan dibandingkan terhadap seluruh Ibu Hamil.	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
					Kesehatan	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
12		Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	7,4	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) terhadap seluruh PUS sasaran KB	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
13		Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap seluruh kehamilan yang terjadi	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan
					Kesehatan	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
14	Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita)	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80	Persentase bayi usia dibawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif terhadap seluruh bayi dibawah 6 bulan	Kesehatan	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
15		Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80	Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dibandingkan dengan Seluruh anak usia 6-23 bulan	Kesehatan	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
16		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90	Persentase layanan tata laksana gizi buruk terhadap seluruh anak balita gizi buruk dalam kurun waktu yang sama	Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
					Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
17		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita	Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
18		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90	Persentase layanan tambahan asupan gizi balita terhadap seluruh anak balita dalam kurun waktu yang sama	Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
19		Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) terhadap seluruh balita	Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
20	Keluarga Berisiko	Keluarga yang Stop BABS	90	Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF) terhadap seluruh keluarga	Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
					Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
					Kesehatan	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
21		Keluarga yang melaksanakan PHBS	70	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap seluruh keluarga	Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
					Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
					Kesehatan	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
22	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap keluarga berisiko stunting	Kesehatan	1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	
				Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	
				Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	
				Kesehatan	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
23		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan terhadap seluruh Persalinan	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
					Kesehatan	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
					Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
24		Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	90	Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan terhadap seluruh Keluarga Berisiko Stunting	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Orang

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
					Kesehatan	1 02 02 2.01 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
25	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi terhadap keluarga berisiko stunting	Pertanian	3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	
				Kesehatan	1 02 05 2.02 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	
				Pangan	2 09 03 2.01 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
26	Air Minum dan Sanitasi	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terhadap seluruh rumah tangga	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen
						1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen
						1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Desik
						1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR
						1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Desik

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui Pemanfaatan Idle Capacity	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR
						1 03 03 2.01 09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Terbinanya dan Terawasinya Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM
						1 03 03 2.01 10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Terbinanya dan Terawasinya Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat
						1 03 03 2.01 12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terfasilitasinya Penyiapan Kerjasama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi	kerjasama Unit
						1 03 03 2.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Pelaksanaan Kerjasama SPAM yang telah Terbina dan Terawasi	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit
						1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Meningkatnya kelembagaan pelaksana penyelenggara n SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM
						1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit
						1 03 03 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga
						1 03 03 2.01 20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
						1 03 03 2.01 21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	90	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di terhadap seluruh rumah tangga	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Dokumen	

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
						1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Teroptimalisasi nya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Teroptimalisasi nya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
							Terpusat Skala Permukiman			
						1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
						1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
						1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
						1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 05 2.01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen
						1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
						1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Terbangun/Tersedianya IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
							1 03 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi
						1 03 05 2.01 17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen
28	Perlindungan Sosial	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi terhadap keluarga penerima PKH	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
29		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan	90	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan	Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga

No	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				
	Sasaran	Indikator	Target	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan
		selain beras dan telur		selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) terhadap keluarga penerima manfaat				Kewenangan Kabupaten/Kota		